

**PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL KANTOR CABANG
PEMBANTU TUBAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Penyelesaian

Program Pendidikan Diploma III

Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh:

DWI WULAN SAFITRI

NIM : 2017110664

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2020

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dwi Wulan Safitri

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 13 Februari 1999

N.I.M : 2017110664

Program Studi : Perbankan dan Keuangan

Program Pendidikan : Diploma 3

Judul : Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor
Cabang Pembantu Tuban

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 31 Agustus 2020

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 31 Agustus 2020

(Dr. Kautsar Riza Salman,SE.,MSA.Ak.) (Kartika Marta Budiana.,S.S, M.pd)
NIDN :726117702 NIDN : 713038801

**PROCEDURE FOR IMPLEMENTING PEOPLE'S CREDIT AT THE
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TUBAN SUB
BRANCH OFFICE**

**Dwi Wulan Safitri
2017110664**

E-mail : 2017110664@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

People's Credit Loans is a priority program of the government in supporting MSMEs in the form of policies for granting credit / financing for working capital and / or investment to individual / individual debtors, business entities, and / or business groups that are productive and feasible, but do not yet have additional collateral or additional collateral yet enough. The purpose of this study are as follows, namely (1) To find out the types of KUR at PT Bank BTPN Tuban Sub-Branch Office, (2) To find out the procedures and implementation of KUR at PT Bank BTPN Tuban Sub-Branch Office Sub-Branch Office, (3) To identify obstacles KUR implementation conducted at PT Bank BTPN Branch Office in Tuban. This research uses descriptive research method. This research is expected to be able to find several problems related to (1) Types of KUR at PT Bank BTPN Tuban Branch Supporting Offices, (2) KUR procedures and implementation at PT Bank BTPN Tuban Branch Supporting Offices, (3) Barriers to KUR implementation at PT Bank BTPN Branch Office in Tuban. The results of this study are related to the formulation of the problem consisting of: (1) Kinds of KUR at PT Bank BTPN Tuban Branch Office, (2) Procedures and implementation of KUR at PT Bank BTPN Tuban Branch Office, (3) Obstacles to implementing KUR which conducted at PT Bank BTPN Tuban Branch Office. The conclusions and suggestions in this study will be useful for both PT Bank BTPN and prospective bank customers. Besides that, this research can also be useful for readers.

Keywords: Procedure, Implementation, People's Business Credit, PT Bank National Retirement Savings Branch Office in Tuban Sub-Branch

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan undang – undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpunan dana dan penyalur dana pada

masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit

merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu,yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam –

meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan kembali pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil dan keuntungannya (Cahyono,2010).

Berdasarkan Undang-Undang pasal 1 No. 11 tahun 1998, diuraikan bahwa arti kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian.

Kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) baru dimulai dengan adanya keputusan Rapat Kabinet Terbatas yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kala itu masih dipimpin Bapak

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sidang tersebut salah satu kebijakan yang diambil kala itu adalah, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong akses pelaku UMKM dan koperasi kepada kredit atau pembiayaan melalui perbankan dengan peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. KUR digulirkan pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 kemudian didukung oleh Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi pelaku kegiatan UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah UMKM. Ketetapan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2008

tentang fasilitas penjaminan KUR. Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak harus selektif dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit diberikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah – masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat. Maksud dan tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang besar serta pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, koperasi sebagai mengatasi kemiskinan dan membuka peluang

kesempatan kerja (Wijaya, 2016).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti, 2017).

Dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan KUR berikut dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka pemerintah mengharapkan dengan penyaluran KUR oleh Bank BTPN Kantor Cabang Pembantu Tuban dapat dijalankan dengan bank dan didukung serta pelaksanaan sepenuhnya oleh setiap pejabat hingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan.

Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur dan pelaksanaan KUR di PT Bank BTPN Kantor Pembantu Cabang Tuban?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan KUR di PT Bank BTPN Kantor Pembantu Cabang Tuban

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu untuk mencoba menerapkan teori yang sudah didapat selama kuliah serta menambah pengetahuan tentang prosedur dan pelaksanaan KUR dalam perbankan

Manfaat penelitian bagi pembaca yaitu sebagai sumbang pikiran bahasan dan saran untuk penelitian.

Manfaat penelitian bagi dunia ilmu pengetahuan yaitu diharapkan bisa sebagai informasi dan sumber pengetahuan mengenai prosedur dan pelaksanaan KUR dalam perbankan

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Menurut Black Henry Campbell, seperti yang dikutip oleh Hermansyah, memberi arti kepada bank sebagai suatu

institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain-lain (Hermansyah, 2005 : 30).

Pasal 1 UU Perbankan NO 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut kamus istilah hukum *Fockema Andrae*, "Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan

memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga”.

Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pinjaman dana atau pemberian investasi berupa barang atau uang yang dapat di gunakan dan kemudian dikembalikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan sesuai perjanjian pada awal pemberian kredit.

Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir 2000:91-95 (Dalam Kumala, Ulvi Nur, 2017: 22) Dalam pemberian kreditnya Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum fasilitas kredit diberikan maka Bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P, dan studi kelayakan. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Character

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. Capacity (Capability)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat *kemampuannya* dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatannya seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personaliti*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan character dari 5 C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lembah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi

jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Prosedur Pelaksanaan Kredit

Kasmir (2012:143) mengemukakan bahwa, prosedur kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Adapun proses pemberian suatu bank adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit

Tahap pertama dari pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh seorang debitur. Permohonan kredit dari calon debitur harus diajukan secara tertulis. Berkas dari permohonan calon debitur terdiri dari surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh calon debitur, data identitas debitur baik identitas pemilik atau badan usaha, data legalitas bagi badan usaha, copy jaminan seperti fotocopy sertifikat rumah.

2. Proses Kredit

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan proses kredit. Sebelum memyetujui permohonan kredit, *account officer* harus melakukan beberapa analisa terlebih dahulu. Adapun analisa tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif ditekankan pada penilaian aspek keuangan calon nasabah. Adapun aspek keuangan yang harus di analisa adalah laporan keuangan dan necara.

b. Analisa Kualitatif

Dalam analisis penilaian kualitatif penilaian kelayakan kredit ditekankan pada:

- 1) Bagaimana manajemen pengelolaan perusahaan tersebut?
- 2) Apakah produksi dan pemasarannya berjalan dengan baik?
- 3) Bagaimana perusahaan tersebut

menggunakan sistem informasi?

- 4) Apakah perusahaan tersebut sudah menggunakan teknologi yang canggih?

c. Analisa Dokumen

Account officer menganalisa apakah dokumen-dokumen nasabah sudah lengkap dan benar sesuai prosedur yang ada

d. Penilaian Jaminan

Dalam melakukan penilaian jaminan, aspek yang harus dianalisa adalah taksasi jaminan dana analisa yuridis. Untuk melakukan analisa taksasi jaminan harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah jaminan tersebut asli atau palsu. Pengecekan tersebut bisa melalui *BI check*, *bank check*, *trade check*, dan foto lain. Analisa yuridis ditujukan kepada badan usaha, apakah badan usaha tersebut didirikan sesuai ketentuan hukum dan lain sebagainya.

e. Persetujuan

Setelah melakukan beberapa analisa, tugas *account officer* selanjutnya adalah meminta persetujuan dari *credit comitte*. *Account officer* melakukan presentasi mengenai data-data calon debitur. Setelah melakukan presentasi selanjutnya melakukan meeting dan sirkulasi apakah calon nasabah layak atau tidak menerima kredit dari bank tersebut.

f. Akad Kredit

Jika permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah kepada bank diterima oleh pihak bank, maka selanjutnya nasabah menyerahkan jaminan. Setelah menyerahkan jaminan, nasabah dapat membuka rekening dan menyetorkan rekening.

Pengertian KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh

fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti, 2017).

Jenis – Jenis KUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR ada beberapa jenis berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu:

- a. KUR Mikro
- b. KUR Kecil
- c. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- d. KUR Khusus

Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BTPN KCP Tuban

- a. KUR Mikro
- b. KUR Ritel
- c. KUR Bukalapak

METODE PENELITIAN Desain Penelitian

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis memilih menggunakan metode penelitian deskriptif..

Batasan Penelitian

Berdasarkan topik penelitian, judul, dan analisis data maka batasan

penelitian tugas akhir ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya mengenai prosedur pelaksanaan KUR pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Tuban.
2. Penelitian ini mengutamakan data sekunder
3. Informasi yang diberikan hanya berupa proses pengajuan KUR, pelaksanaan, dan proses pencairan KUR pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Tuban.

Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Data

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup lembar permohonan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian dan sumber lain yang relevan dan berkaitan

dengan masalah yang diteliti.

b. Metode Pengumpulan Data

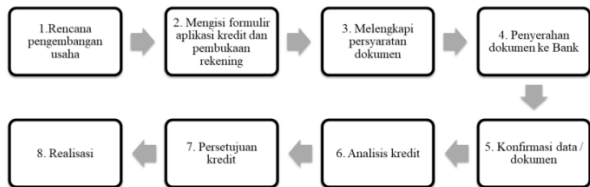
Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan adalah teknik analisis data secara deskriptif. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mencari data dari web web terpercaya seperti OJK, BI, Bank yang bersangkutan atau buku buku dan hasil wawancara
2. Data yang di dapat lalu di analisis menggunakan metode analisis deskriptif
3. Mentriangulasi atau memeriksa kembali data yang sudah diperoleh dengan informasi hasil studi pustata dan hasil dari wawancara.
4. Menyesuikannya dengan ketentuan BI, OJK, serta Bank yang bersangkutan
5. Penarikan kesimpulan akhir dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat



Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTPN KCP Tuban

Adapun uraian dari gambar Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pengembangan Usaha

Pada tahap awal pengajuan kredit, *sales dan marketing officer* akan datang untuk bertamu ke rumah dan tempat usaha, biasanya sekaligus dengan foto-foto rumah tempat tinggal, jaminan, dan tempat usaha. Survey ini penting dilakukan oleh bank untuk menjalankan prinsip kehati-hatian bank dalam menjaga dana amanah yang dikelola dari simpanan orang lain.

2. Mengisi Formulir Aplikasi Kredit dan Pembukaan Rekening

Calon nasabah mengisi formulir aplikasi kredit yang diberikan oleh *sales dan marketing officer* serta mengisi formulir pembukaan rekening baru (apabila belum ada rekening di Bank BTPN). Rekening tersebut guna untuk realisasi kredit. Setelah mengisi form tersebut *sales marketing officer* melakukan BI Check.

3. Melengkapi Persyaratan Dokumen

Calon nasabah wajib melengkapi persyaratan dokumen yang sudah ditentukan atau dokumen yang wajib dipenuhi dari Bank BTPN mulai dari data historis UMKM, data proyeksi, dan data jaminan. Adapun dokumen yang wajib dipenuhi akan dijelaskan lebih rinci di sub-bab selanjutnya.

4. Penyerahan Dokumen ke Bank

Setelah melengkapi semua persyaratan dokumen dan mengisi formulir aplikasi kredit serta pembukaan rekening (apabila belum ada rekening di Bank BTPN) *sales dan marketing officer* akan mengecek kembali kemudian menyerahkan ke Bank BTPN.

5. Konfirmasi Data dan Dokumen

Data dan dokumen yang dibawa oleh *sales dan marketing officer* akan di cek kembali oleh *sales dan marketing spv* kemudian diproses untuk lanjut ke tahap berikutnya.

6. Analisis Kredit

Analisis kredit yang di gunakan sesuai berdasarkan prosedur yang ditetapkan menggunakan analisis 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character*

Criteria yang pertama adalah *Chatacter*, yaitu melihat bagaimana kemampuan dan latar belakang calon debitur yang akan mengajukan kredit. *Criteria character* ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Dari *criteria* ini akan

dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon debitur tersebut, apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.

2. *Capacity (capability)*

kriteria yang kedua adalah *capacity* atau kerap disebut dengan *capability* yaitu bagaimana kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya. Criteria ini dilihat dari bagaimana debitur atau nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diperoleh tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar kreditnya maka bear kemungkinan kredit yang diterima akan ditolak.

3. *Capital*

Kriteria ketiga adalah *capital* atau modal yang dimiliki calon debitur yang khususnya diberlakukan nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau asset yang dimiliki usaha

4. *Collateral*

Kriteria keempat merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

1. *Condition*

Pemberian kredit juga dinilai melalui keadaan ekonomi,

politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha di masa tertentu.

7. Persetujuan Kredit

Setelah semuanya memenuhi kriteria kelayakan kredit, persyaratan dan prosedur yang ada di Bank BTPN *sales dan marketing spv* menyerahkan langsung ke *branch head* untuk disetujui dan di tandatangani.

8. Realisasi

Setelah disetujui debitur datang ke notaris untuk kemudian mengesahkan jaminan. Hasil dari persetujuan kredit akan diteruskan kepada bagian admin bank dan diinput datanya agar dapat segera di lakukan pencairan dana ke rekening yang sudah dibuat di Bank BTPN tersebut sebelum akad kredit dilakukan.

Dana yang telah cair ke rekening ini diharapkan digunakan sesuai tujuan awal dan khusus untuk keperluan usaha sehingga usahanya bertambah maju dan hasil keuntungan digunakan sebagian untuk membayar angsurannya.

Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Dian bagian kredit, diolah sendiri

Persyaratan dan Tata Cara / Prosedur :

1. Tidak memiliki pinjaman KUR
2. Tidak memiliki pinjaman modal usaha, (modal kerja / investasi) di Bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Apabila pinjaman berupa

- kartu kredit, kredit kepemilikan rumah (KPR), dan kredit kendaraan bermotor (KKB), masih diperkenankan untuk mengajukan KUR
3. Mengisi formulir permohonan kredit dan pembukaan rekening
 4. Calon debitur wajib memenuhi persyaratan utama untuk dapat diberikan pembiayaan, diantaranya tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Usaha debitur masih berjalan dan telah berjalan selama minimal 6 bulan
 - b) Bukan merupakan jenis usaha yang illegal atau jenis usaha yang dilarang
 - c) Usia minimum 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah
 - d) Warga Negara Indonesia
 - e) Memiliki riwayat pinjaman yang baik (bagi yang pernah/memiliki pinjaman pada kreditur lain)
 5. Dokumen yang wajib dipenuhi :

Dokumen Persyaratan

 - a) Aplikasi permohonan kredit dan pembukaan rekening
 - b) Dokumen identitas KTP (beserta KTP pasangan), Kartu Keluarga / Akta Nikah (jika sudah menikah), Akta Cerai atau Akta/Surat
- Kematian (jika janda atau duda)
- c) NPWP
 - d) Surat ijin / keterangan usaha (dari kelurahan / kementrian)
- Dokumen Pengikatan Kredit**
- a) Perjanjian kredit
 - b) Surat pengikatan agunan
6. Setiap permohonan yang memenuhi persyaratan diatas akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku di BTPN MUR.
 7. Debitur wajib memberikan data dan/atau keterangan yang disyaratkan dan diperlukan serta menjamin kebenaran atas data dan/atau dokumen dan/atau keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan yang diberitahukan dan diserahkan, dan membebaskan BTPN MUR dari segala kerugian, tuntutan atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari atas data dan/atau keterangan yang diberikan oleh debitur.
 8. Apabila diperlukan penjelasan lebih lengkap mengenai informasi produk kredit dapat menghubungi petugas cabang BTPN MUR.
 9. Terkait tata cara pengaduan debitur terkait kredit ini dapat dilakukan melalui cabang BTPN MUR terdekat atau menghubungi layanan BTPN call 1500300.

PENUTUP
Kesimpulan

Kesimpulan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKMK dalam bentuk penyaluran dana untuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Dalam PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Tuban KUR terbagi menjadi 3 macam yaitu : a) KUR Mikro, b) KUR Ritel, c) KUR Bukalapak.

2. Adapun persyaratan dan prosedur KUR di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Tuban yaitu : Tidak memiliki pinjaman KUR, Tidak memiliki pinjaman modal usaha, (modal kerja / investasi) di Bank ataupun lembaga keuangan lainnya, Mengisi formulir permohonan kredit dan pembukaan rekening, Calon debitur wajib memenuhi persyaratan utama untuk dapat diberikan pembiayaan, memenuhi dokumen persyaratan dan pengikatan kredit, Setiap permohonan yang memenuhi persyaratan diatas akan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku di BTPN MUR, Debitur wajib memberikan data dan/atau keterangan yang disyaratkan dan diperlukan serta menjamin kebenaran atas data dan/atau dokumen dan/atau keterangan yang diberikan.

3. Dalam produk KUR ini ada beberapa hambatan yang menjadi kendala PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional yaitu : a) kurangnya sosialisasi kelapangan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Kredit

Usaha Rakyat ada di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Tuban, b) kurangnya kelengkapan persyaratan yang diserahkan nasabah sehingga proses untuk realisasi sedikit terhambat. c) pada proses pelaksanaan KUR mengalami masalah berupa masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah daerah, masyarakat mendapatkan fasilitas pinjaman dari pemerintah daerah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak cuma disalurkan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Tuban namun juga banyak disalurkan oleh bank-bank lainnya.

Saran

Saran dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Cara mengatasi hambatan yaitu tentang kemampuan debitur dalam hal mengatur kondisi keuangan pribadi dan keuangannya yang masih di campur aduk menjadi satu, bank dapat melakukan pengawasan dan pembinaan kepada debitur setiap satu minggu sekali atau satu bulan sekali dengan datang langsung ke rumah atau ke tempat usaha debitur, untuk mengajarkan cara mengatur kondisi keuangan pribadi dan keuangan usaha yang baik dan benar. Sehingga kedepannya tidak akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam hal pembayaran kewajibannya (membayar angsuran kredit) serta dapat mengantisipasi agar tidak terjadi gagal bayar.

2. Salah satu upaya yang harus dilakukan BTPN untuk mengatasi hal tersebut dengan *sales marketing officer* harus pandai me reset kembali pengeluaran dan pemasukan keuangan calon nasabah dan membuat laporan keuangan yang mudah dimengerti oleh nasabah sehingga kedepannya nasabah bisa membuat laporan keuangannya sendiri. Selain itu, dalam produk KUR di BTPN tersendiri sudah ada Program Daya yaitu pelatihan bagi nasabah KUR BTPN. Untuk itu BTPN bias menambahkan program pelatihan bagi calon nasabah yang kesulitan dalam mengelola data keuangannya.

Implikasi

Implikasi atau dampak dari Tugas Akhir yang berjudul Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Tuban yaitu :

- 1) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Tuban dapat mengetahui hambatan – hambatan yang ada pada produk KUR tersebut.
- 2) Tugas Akhir ini diharapkan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Tuban bisa lebih dikenal masyarakat luas, sekitar daerah Tuban khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi Rizki, 2018. *Macam-Macam Kredit*. Diakses di <https://www.price>

book.co.id/article/market_issue/2017/08/11/7199/mac-am-macam-kredit-berdasarkan-jenis-pengelompokannya, pada tanggal 14 Maret 2019

Amanda, Praiselia. 2015. “Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pertanian Pada Bank Bri Kantor Cabang Tondano.” In *Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado*, , 6.

Ananta Yanurisa, 2019. *Persaingan Perbankan Saat Ini*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190219142522-17-56383/persaingan-perbankan-makin-ketat-ojk-minta-bank-konsolidasi>, pada tanggal 13 Maret 2019.

Artikelsina, 2015. *Macam-macam kredit*. Diakses di <https://www.artikelsiana.com/2015/09/kredit->

- pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html
- spot.com/2018/01/jenis-jenis-risiko-di-bank.html), pada tanggal 25 Maret 2019.
- Astiko, 1996. Manajemen Perkreditan. Yogyakarta : Andi Offset, hal 5
- Kasmir. 2014. “Dasar-Dasar Perkreditan.” In , 1–23.
- Cahyono, Bahtiyar Adi. 2010. “Prosedur Pengajuan Kredit Pada Pd. Bpr Bkk Tasikmadu Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar Tugas.” In *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*, , 22–23
- Kumala, Ulvi Nur (2017) *Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Secara Optimal Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lamongan*. Diploma thesis, STIE Perbanas Surabaya.
- Haryana, Gani. 2014. “Analisis Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Bri Unit Tabek Patah Cabang Batusangkar Sumatera Barat.” : 1–8.
- KUR. Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020, diakses di <https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020> pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 22.00 WIB.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Prenada Media..
- Muhamad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Iskandar David, 2018. Jenis-jenis Risiko Kredit. Diakses di (<https://belajarperbankgratis.blog>

- OJK diakses di
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/Pages/Tugas.aspx>, pada tanggal 26 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB
- Pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998. Tentang Perbankan
- Pasal 1 Undang-Undang No.11 tahun 1998. Tentang pengertian kredit
- PT BTPN Tbk. Diakses di <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/segmen-usaha/btpn-mitra-usaha-rakyat/paketmu-kredit-usaha-rakyat>, pada tanggal 14 April 2020
- R.Tjiptoadinugroho. 1990. Perbankan Masa lah Perkreditan. P.T Prasdinya Paramita, Jakarta
- Riyadi Dwi, 2009. Pengertian kredit. Diakses di http://eprints.undip.ac.id/17202/1/DWI_RIYADI.pdf, pada tanggal 30 Maret 2019
- Soejono, Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suhardi, Gunarto. 2016. “Prosedur Penyaluran Dan Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat(Kur) Pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.” *Jurnal Aspek Hukum Dalam Bisnis*: 22.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : Alfabeta
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Thomas Suyatno, dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang – Undang No.7 tahun 1992. Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor
10 Tahun 1998
- Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998
tentang
Perbankan.
- Widiastuti, Rahayu. 2017.
“Apakah Kredit
Usaha Rakyat
(Kur) Berdampak
Pada Kinerja
Usaha (Studi
Pada Umkm
Makanan Ringan
Di Kota
Salatiga).” *Jurnal
Visi Manajemen*
2(2): 100–115.
- Wijaya, Frenky Tanni. 2016.
“Pengaruh
Program Kredit
Usaha Rakyat
(Kur) Pt. Bank
Rakyat Indonesia
Unit Teluk Panji
Terhadap
Kehidupan Sosial
Ekonomi
Masyarakat Di
Desa Teluk Panji
Kecamatan
Kampung Rakyat
Kabupaten
Labuhanbatu
Selatan.” : 1–12.

